

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online	.....

Wilayah: Kabupaten Wonogiri

Halaman 13

## Bupati: Tak Ada Anggaran Titipan

WONOGIRI—Bupati Wonogiri Joko Sutopo berkomitmen tak akan menitipkan alokasi anggaran tertentu dalam APBD Perubahan 2020 untuk kepentingan pemenang dalam pemilihan kepala daerah akhir tahun ini.

Dia mempersilakan warga mencermati dan mengawal pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2020 di DPRD Kabupaten Wonogiri. Bupati Joko Sutopo menjadi calon bupati petahana dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Wonogiri 2020.

Sebelum membahas Rancangan APBD Perubahan 2020, tim anggaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan DPRD Kabupaten Wonogiri membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau (PPAS) 2020.

Informasi yang dihimpun *Espos*, Kamis (13/8), Bupati Wonogiri menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 2020 pada Jumat (7/8) lalu. Badan Anggaran DPRD Wonogiri membahas dokumen tersebut.

Setelah itu rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dibahas lagi oleh komisi-komisi di DPRD Kabupaten Wonogiri pada Selasa (11/8). Pembahasan kembali ke Badan Anggaran pada Rabu (12/8). Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disetujui menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS 2020 dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis kemarin dan kemudian dibahas lagi.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo ketika diwawancarai *Espos* mengatakan proses pembahasan APBD Perubahan 2020 dia jamin bersih dari praktik titip anggaran untuk kepentingan pribadinya di pemilihan kepala daerah 2020.

Dia meminta masyarakat tak perlu khawatir karena tata kelola anggaran selalu diawasi lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK akan mengaudit pengelolaan anggaran. Apabila ada anggaran yang tak sesuai kaidah, BPK pasti menemukan.

### Sesuai Harapan Publik

Setiap mengaudit pengelolaan keuangan daerah BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi yang harus dilaksanakan. Ia tak ingin mempertaruhkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang selama ini dinilai baik oleh pemerintah pusat.

"Menyelenggarakan pengelolaan anggaran yang tepat dan sesuai harapan publik selalu menjadi komitmen saya. Publik bisa dan boleh mengontrol pengelolaan APBD," kata dia.

Ia mengatakan dirinya tak memiliki kepentingan pribadi dalam mengelola APBD Perubahan 2020. Bukan karena merasa percaya diri bakal memenangi pemilihan kepala daerah, tetapi dirinya sejak awal berkomitmen pengelolaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Kabupaten Wonogiri secara menyeluruh.

Wujudnya adalah program prioritas. Merealisasikan program yang berpihak kepada kepentingan rakyat dengan sendirinya akan mendorong rakyat menentukan sikap sendiri dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 mendatang.

Rakyat akan menentukan pilihan politik sesuai dengan apa yang mereka rasakan sebagai warga Kabupaten Wonogiri selama empat tahun terakhir.

"Tidak perlu menyelip-nyelipkan anggaran. Ketika program-program yang dilaksanakan *legitimate*, sesuai harapan publik, publik bisa menilai sendiri," kata.

Pendapatan dan belanja anggaran pada postur perubahan KUA dan perubahan PPAS 2020 turun dibanding dengan APBD 2020. Pendapatan pada perubahan KUA dan perubahan PPAS senilai Rp2,247 triliun atau turun Rp104,345 miliar daripada dalam APBD 2020 yang senilai Rp2,351 triliun.

Belanja pada perubahan KUA dan perubahan PPAS tercatat Rp2,472 triliun atau turun Rp2,731 miliar daripada yang tercantum dalam APBD 2020 yang senilai Rp2,474 triliun. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri, Bambang Sadriyanto, melalui laporan tertulis meminta pemerintah kabupaten mengoptimalkan pemanfaatan belanja tak terduga.

Pengoptimalan itu untuk menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak besar pada akhir tahun anggaran. Komisi I juga meminta organisasi perangkat daerah yang akan menambah dan menggeser anggaran berkoordinasi dengan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. (Rudi Hartono)

